

Identifikasi Tingkat Pelayanan Prasarana Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung

Identify The Level Of Infrastructure Service Based On Minimum Service Standards In The Kiaracondong Sub-District Of Bandung

¹Raja Pardomuan Harahap, ²Hani Burhanudin

^{1,2}*Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹pardomuan025@gmail.com, ²haniburhan1966@gmail.com

Abstract. The minimum service standard is a term in public service that concerns the quality and quantity of public services provided by the government as an indicator of public welfare. Kiaracondong Subdistrict is one of the 4 (four) Subdistricts in SWK Karees. Based on the RTRW of Bandung City in 2011-2031, Kiaracondong Subdistrict is included in the high density population classification, which is 21,228 Souls / Km², with the condition of road network infrastructure that still experiences obstacles such as congestion and damaged road conditions, there are still a number of inundation locations. with a long duration, there are still people who do not have a private septic tank, there are still people who have not received garbage transportation services, and there are still people who have not received clean water network services either with piping or non-piping systems. In connection with these problems, of course the infrastructure services that are there are lacking and minimal to meet and serve the daily needs of the community. This study uses various analyzes such as accessibility index analysis, mobility index analysis, road condition analysis, wastewater management analysis, analysis of inundation area reduction, solid waste management analysis, and analysis of clean water services with the final results in the form of service levels of each type of infrastructure, whether it has met minimum service standards or not.

Keywords: Infrastructure, SPM, Service Level.

Abstrak. Standar pelayanan minimal merupakan istilah dalam pelayanan publik (public policy) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan public yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Kecamatan Kiaracondong merupakan salah satu dari 4 (empat) Kecamatan yang ada di SWK Karees. Berdasarkan RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031, Kecamatan Kiaracondong termasuk kedalam klasifikasi penduduk kepadatan tinggi yaitu 21..228 Jiwa/Km², dengan kondisi prasarana jaringan jalan yang masih mengalami kendala seperti kemacetan dan kondisi jalan yang rusak, masih ditemukan beberapa lokasi yang terdapat genangan dengan durasi yang cukup lama, masih ada masyarakat yang belum memiliki septic tank pribadi, masih ada masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah, dan masih ada masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan jaringan air bersih baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka tentu pelayanan prasarana yang ada di sana kurang dan minim untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari. Studi ini menggunakan berbagai analisis seperti analisis indeks aksesibilitas, analisis indeks mobilitas, analisis kondisi jalan, analisis pengelolaan air limbah, analisis pengurangan luas genangan, analisis pengelolaan persampahan, dan analisis pelayanan air bersih dengan hasil akhir berupa tingkat pelayanan dari masing-masing jenis prasarana, apakah sudah memenuhi standar pelayanan minimal atau belum.

Kata Kunci: Prasarana, SPM, Tingkat Pelayanan.

A. Pendahuluan

Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan sebagai tolak ukur (benchmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. Bagi masyarakat, Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu

pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).

Kebijakan pola ruang Kota Bandung berdasarkan Perda No.18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 yaitu :

1. Membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU).

2. Mengendalikan pembangunan di Kawasan Bandung Barat yang telah berkembang dengan pesat yaitu meliputi SWK Bojonegara, SWK Cibeunying, SWK Tegalega, dan SWK Karees.

3. Mengarahkan dan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Bandung Timur yang meliputi SWK Arcamanik, SWK Ujungberung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage.

Kecamatan Kiaracondong merupakan salah satu dari 4 (empat) Kecamatan yang ada di SWK Karees. Berdasarkan RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031, Kecamatan Kiaracondong termasuk kedalam klasifikasi penduduk kepadatan tinggi yaitu 21..228 Jiwa/Km², dengan kondisi prasarana eksisting sebagai berikut :

1. Jaringan Jalan

Berdasarkan data dan hasil pengamatan, masih terdapat jalan dengan kondisi yang rusak yaitu sepanjang 10,63 Km. Masih sering terjadinya kemacetan di Jalan Ibrahim Adjie dan Jalan Terusan Jakarta.

2. Jaringan Drainase

Berdasarkan data dan hasil pengamatan, ada beberapa titik lokasi drainase yang disalahgunakan oleh masyarakat yaitu dengan membuang sampah ke saluran drainase sehingga menjadi penyebab terjadinya genangan banjir.

3. Jaringan Air Limbah

Berdasarkan data dan hasil pengamatan, terdapat 59.939 jiwa yang belum mendapatkan akses atau pelayanan pengelolaan air limbah (septic tank). Masih ada masyarakat yang membuang limbah rumah tangganya langsung ke sungai

dikarenakan belum memiliki pelayanan pengelolaan air limbah.

4. Persampahan

Berdasarkan data dan hasil pengamatan, rata-rata masyarakat sudah terlayani sistem pengangkutan sampah, namun masih ada di beberapa Kelurahan yang masyarakatnya belum mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah dengan jumlah sebanyak 11.484 jiwa.

5. Jaringan Air Bersih

Berdasarkan data dan hasil pengamatan, masih ada masyarakat yang belum mendapatkan akses atau pelayanan air bersih dengan jumlah 30.604 jiwa. Pada hari rabu tanggal 3 juli 2019 di Kelurahan Babakan sari, masyarakat mengalami kesulitan air bersih sehingga menyebabkan masyarakat harus mengambil air bersih yang ada di pom bensin terdekat, namun masyarakat harus bergiliran untuk mendapatkan akses air bersih, karena pihak pom bensin hanya menyediakan air dua juam sekali.

Dengan melihat fenomena yang terjadi di Kecamatan Kiaracondong maka penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan tingkat pelayanan prasarana yang ada di Kecamatan Kiaracondong, dengan judul “Identifikasi Tingkat Pelayanan Prasarana Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung”.

B. Landasan Teori

Standar pelayanan minimal merupakan istilah dalam pelayanan publik (public policy) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan public yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Menurut Oertarto, et al (2004:173) menjelaskan bahwa standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah (daerah) maupun masyarakat (konsumen). Adapun nilai strategis tersebut:

Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan sebagai tolak ukur (benchmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. Bagi masyarakat, Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah). Berdasarkan Permen PU No 1 Tahun 2014 dapat diketahui berbagai jenis prasarana, meliputi:

1. Jaringan Jalan

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang berada di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air yang meliputi dari bangunan pelengkap dan perlengkapannya guna memenuhi pemnagunan lalu lintas keculi jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Kegiatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh keberadaan jalan untuk mempermudah dalam beraktifitas baik itu barang, jasa, ataupun kegiatan pemerintah sampai kepada sistem pertahanan dan

keamanan negara.

2. Jaringan Air Limbah

Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah. Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangki septik/MCK komunal) dan/atau berupa sistem pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional).

3. Jaringan Drainase

Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. Drainase adalah prasarana drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup.

4. Jaringan Persampahan

Pengelolaan sampah didefinisikan adalah semua kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan

akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat.

5. Jaringan Air Bersih

Sistem jaringan air bersih dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk suatu kota atau suatu komunitas. Sumber air baku dapat berasal dari mata air, danau, sungai atau air tanah dalam. Air tersebut kemudian diolah pada instalasi pengolahan air supaya memenuhi standar air bersih yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan kemudian didistribusikan pada konsumen.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Indeks Aksesibilitas

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, kepadatan penduduk Kecamatan Kiaracandong adalah sebesar 21.228 jiwa/km², dimana berdasarkan klasifikasi indeks aksesibilitas angka tersebut masuk kedalam klasifikasi kepadatan penduduk sangat tinggi yaitu (> 5.000 jiwa/km²) dengan nilai kualitas indeks aksesibilitas > 5 (keterangan : km/km²). Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, nilai indeks aksesibilitas Kecamatan Kiaracandong adalah sebesar 13,82 Km/Km². Setelah didapatkan nilai kualitas indeks aksesibilitas dan nilai indeks aksesibilitas eksisting kecamatan Kiaracandong, langkah selanjutnya adalah membandingkan antara nilai kualitas indeks aksesibilitas dengan nilai indeks aksesibilitas kecamatan

Kiaracandong. Ternyata nilai indeks aksesibilitas eksisting Kecamatan Kiaracandong lebih besar dibandingkan dengan nilai kualitas indeks aksesibilitas Kecamatan Kiaracandong, yaitu nilai indeks aksesibilitas eksisting Kecamatan Kiaracandong adalah 13,82 Km/Km² dan nilai kualitas indeks aksesibilitas Kecamatan Kiaracandong adalah 5 Km/Km². Artinya kondisi ini menunjukkan bahwa secara aksesibilitas Kecamatan Kiaracandong telah memenuhi SPM, karena telah tersedianya jaringan jalan yang mudah diakses oleh masyarakat, dan panjang jaringan jalan di Kecamatan Kiaracandong telah memiliki kemampuan menjangkau seluruh pelosok wilayah di Kecamatan Kiaracandong.

Analisis Indeks Mobilitas

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, PDRB Perkapita kecamatan Kiaracandong adalah sebesar Rp 47.222.371/kapita/tahun, dimana berdasarkan klasifikasi indeks mobilitas angka tersebut masuk kedalam klasifikasi PDRB Perkapita sangat tinggi yaitu (> 10 juta/kapita/tahun) dengan nilai kualitas indeks mobilitas > 5 (Keterangan : km/1000 penduduk). Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, nilai indeks mobilitas Kecamatan Kiaracandong adalah sebesar 0,0006 km/1000 penduduk.

Setelah didapatkan nilai kualitas indeks mobilitas dan nilai indeks mobilitas eksisting kecamatan Kiaracandong, langkah selanjutnya adalah membandingkan antara nilai kualitas indeks mobilitas dengan nilai indeks mobilitas eksisting kecamatan Kiaracandong. Ternyata nilai kualitas indeks mobilitas Kecamatan Kiaracandong lebih besar dibandingkan dengan nilai indeks mobilitas eksisting, yaitu nilai indeks mobilitas eksisting

Kecamatan Kiaracundong adalah 0,0006 Km/1000 penduduk, dan nilai kualitas indeks mobilitas Kecamatan Kiaracundong adalah > 5 . Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun secara aksesibilitas Kecamatan Kiaracundong telah mampu dalam penyediaan jaringan jalan yang mudah diakses oleh masyarakat, namun untuk menampung mobilitas atau pergerakan masyarakatnya belum terpenuhi.

Analisis Kondisi Jalan

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa, tingkat pelayanan kondisi jalan di Kecamatan Kiaracundong adalah 87,45 %, dimana angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan target atau standar yang ditetapkan. Artinya untuk kondisi jalan di Kecamatan Kiaracundong telah memenuhi standar pelayanan minimal, namun meskipun demikian masih ada kondisi jalan yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh faktor alami maupun dari aktivitas manusia. Untuk itu pemerintah perlu melakukan perbaikan jalan terkait kondisi jalan yang rusak agar bisa melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal.

Analisis Pengelolaan Air Limbah

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dapat diketahui bahwa, tingkat pelayanan pengelolaan air limbah di Kecamatan Kiaracundong adalah sebesar 53,94 %, dimana angka tersebut belum memenuhi standar pelayanan minimal yang ada yaitu sebesar ≥ 60 %. Itu berarti dibutuhkan 6,06 % penduduk yang harus dilayani pengelolaan air limbah agar bisa memenuhi standar pelayanan minimalnya yaitu 60 %. Langkah selanjutnya yaitu menghitung berapakah jumlah penduduk tambahan yang harus dilayani pengelolaan air limbah dan

berapa jumlah tangki septik yang dibutuhkan untuk melayani penduduk tersebut. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, ternyata ada sebanyak 7.885 jiwa yang harus terlayani tangki septik agar bisa mencapai standar pelayanan minimal. Langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah tangki septik yang dibutuhkan untuk melayani penduduk tersebut.

Berdasarkan Permen PU No. 01/PRT/M/2014 tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bahwa (1 tangki septik = melayani 5 KK) dan (1 KK = 5 orang). Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa di Kecamatan Kiaracundong, untuk mencapai standar pelayanan minimal yaitu 60 % dibutuhkan sebanyak 316 unit tangki septik untuk melayani penduduk sebanyak 7.885 jiwa. Namun berdasarkan standar pelayanan minimal yang khusus diberlakukan untuk kota Bandung maka hasil perhitungan yang telah dilakukan itu telah memenuhi dan mencapai target, karena standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah yang diberlakukan khusus untuk Kota Bandung adalah sebesar 50%.

Analisis Tingkat Pelayanan Jaringan Drainase

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa jumlah pengurangan luas genangan di kecamatan Kiaracundong adalah 73,33 %, artinya bahwa pengurangan luas genangan di kecamatan Kiaracundong berdasarkan Permen PU No. 01 Tahun 2014 dan berdasarkan SPM Kota Bandung itu telah memenuhi standar pelayanan minimal, dimana target pengurangan luas genangan berdasarkan Permen PU No. 01 Tahun 2014 adalah 50 %, dan target pengurangan luas genangan berdasarkan SPM Kota

Bandung adalah 57,35 %. Namun meskipun pengurangan luas genangan telah memenuhi standar pelayanan minimal, masih ada genangan yang belum tertangani. Masalah genangan yang terjadi Kecamatan Kiaracandong lebih didominasi oleh faktor alamiah, meskipun demikian kontribusi aktifitas masyarakat juga ikut mempengaruhi seperti adanya kegiatan permukiman dan sebagainya. Selain itu genangan dan luapan yang terjadi juga bisa disebabkan karena belum terciptanya sistem irigasi yang tertata dengan baik atau desain drainase yang ada tidak lagi sesuai dengan kondisi dan potensi luapan genangan yang terjadi, dengan kata lain bahwa volume air genangan dan luapan sudah lebih besar dibandingkan dengan kapasitas saluran drainase.

Analisis Kebutuhan dan Tingkat Pelayanan TPS

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa jumlah kebutuhan TPS di Kecamatan Kiaracandong adalah sebanyak 4 TPS, dimana jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah TPS eksisting yang ada di Kecamatan Kiaracandong yaitu 6 TPS (artinya sudah terlayani 100%), itu berarti bahwa tingkat pelayanan pengelolaan persampahan di Kecamatan Kiaracandong telah memenuhi standar pelayanan minimal.

Analisis Pelayanan Pengangkutan Sampah

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa, tingkat pelayanan pengangkutan sampah di Kecamatan kiaracandong adalah 91,17 %, dimana angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan yaitu 70 %, itu berarti bahwa tingkat pelayanan pengangkutan sampah di Kecamatan

Kiaracandong telah memenuhi standar pelayanan minimal. Namun meskipun demikian masih ada masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah, hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengoptimalkan sistem pengangkutan sampah di Kecamatan Kiaracandong agar pelayanan pengangkutan sampah bisa mencapai 100 %.

Analisis Tingkat Pelayanan Air Bersih

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa persentase masyarakat yang terlayani air bersih adalah 76,49 %, itu berarti bahwa tingkat pelayanan air bersih di Kecamatan Kiaracandong berdasarkan Permen PU No. 01 Tahun 2014 dan berdasarkan draft SPM Kota Bandung belum memenuhi standar pelayanan minimal yaitu 81,77 % dan 78,30 %.

Matriks Perbandingan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan semua hasil analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa jenis prasarana yang telah memenuhi standar pelayanan minimal dan yang belum memenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa terdapat dua jenis prasarana yang telah memenuhi standar pelayanan minimal dan tiga jenis prasarana yang belum memenuhi, baik itu menurut Permen PU maupun Draft SPM Kota Bandung.

Langkah selanjutnya adalah memberikan rekomendasi atau saran terkait dengan jenis prasarana yang belum memenuhi maupun yang sudah memenuhi standar pelayanan minimal.

Jaringan Jalan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, untuk jaringan jalan di

Tabel 1. Matriks Perbandingan SPM

SPM	Jenis Prasarana				
	Jalan	Air Limbah	Drainase	Persampahan	Air Bersih
Permen PU No. 01 Tahun 2014	Sudah Memenuhi	Belum Memenuhi	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi	Belum Memenuhi
Draft SPM Kota Bandung	Belum Memenuhi	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi	Belum Memenuhi

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Kecamatan Kiaracondong itu belum memenuhi standar pelayanan minimal, meskipun secara aksesibilitas telah terpenuhi namun secara mobilitas untuk menampung pergerakan masyarakatnya itu belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan adanya kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan dan lebar yang kurang (sempit), sehingga menyebabkan mobilitas penduduk menjadi terganggu. Maka dari itu perlu adanya perbaikan jalan yang mengalami kerusakan dan pelebaran jalan yang sering menjadi titik kemacetan.

Jaringan Air Limbah

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kondisi jaringan air limbah di Kecamatan Kiaracondong belum memenuhi standar pelayanan minimal. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki fasilitas septic tank dan mereka rata-rata membuang limbah rumah tangganya langsung ke sungai. Di Kecamatan Kiaracondong saat ini ada sebanyak 70.190 jiwa yang sudah terlayani septic tank dengan jumlah 2.808 unit septic tank, dengan persentase 53,94 %. Maka dari itu dibutuhkan 6,06 % lagi atau sebanyak 7.885 jiwa yang dilayani 316 unit septic tank untuk mencapai target atau standar pelayanan minimal.

Jaringan Drainase

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kondisi jaringan drainase di Kecamatan Kiaracondong telah memenuhi standar pelayanan minimal, dimana persentase pengurangan luas genangan yang sudah dilakukan adalah 73,33 %, dimana angka tersebut sudah melebihi standar atau target yang ditentukan. Namun meskipun sudah memenuhi standar pelayanan minimal, tetap saja masih ada genangan yang belum tertangani. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, di Kecamatan Kiaracondong masih ada genangan dengan luas 0,40 Ha yang belum tertangani, tepatnya di simpang Jl. Jakarta – Jl. Kiaracondong dengan durasi \pm 3 jam. Maka dari itu perlu adanya tindakan lanjutan yaitu dengan memperbaiki saluran drainase yang memiliki kedalaman dan ketinggian yang kurang untuk bisa menampung air saat terjadi hujan dengan durasi yang cukup lama, agar pengurangan luas genangan di Kecamatan Kiaracondong bisa mencapai angka 100 %.

Persampahan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kondisi persampahan di Kecamatan Kiaracondong telah memenuhi standar pelayanan minimal.

Namun meskipun begitu masih ada penduduk yang belum mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah yaitu sebanyak 11.484 jiwa. Maka dari perlu adanya peningkatan pelayanan pengangkutan sampah khusus di kelurahan Kebon Kangkung dan Kebon Jayanti, karena 2 Kelurahan tersebut memiliki persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan 4 Kelurahan lain yang ada di Kecamatan Kiaracondong.

Jaringan Air Bersih

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, kondisi jaringan air bersih di Kecamatan Kiaracondong belum memenuhi standar pelayanan minimal, baik menurut Permen PU maupun draft SPM Kota Bandung. Maka dari itu perlu adanya peningkatan pelayanan air bersih untuk bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Permen PU maupun Draft SPM Kota Bandung.

1. Peningkatan Pelayanan Berdasarkan Permen PU No. 01 Tahun 2014

Berdasarkan Permen PU No. 01 Tahun 2014, standar pelayanan minimal untuk jaringan air bersih adalah 81,77 %, Langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah penduduk yang harus terlayani air bersih agar bisa mencapai memenuhi standar pelayanan minimal, dimana dibutuhkan 5,28 % persentase penduduk terlayani agar bisa mencapai standar pelayanan minimal.

- \sum Penduduk harus terlayani air bersih = 5,28 % X 130.129 jiwa
= 6.871 jiwa

Berdasarkan data dan perhitungan yang dilakukan, untuk mencapai target atau standar pelayanan minimal itu dibutuhkan peningkatan

pelayanan jaringan air bersih baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan untuk melayani kebutuhan air bersih penduduk sebanyak 6.871 jiwa di Kecamatan Kiaracondong.

2. Peningkatan Pelayanan Berdasarkan Draft SPM Kota Bandung

Berdasarkan Draft SPM Kota Bandung, standar pelayanan minimal untuk jaringan air bersih adalah 78,30 %, Langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah penduduk yang harus terlayani air bersih agar bisa mencapai memenuhi standar pelayanan minimal, dimana dibutuhkan 1,81 % persentase penduduk terlayani agar bisa mencapai standar pelayanan minimal.

- \sum Penduduk harus terlayani air bersih = 1,81 % X 130.129 jiwa
= 2.355 jiwa

Berdasarkan data dan perhitungan yang dilakukan, untuk mencapai target atau standar pelayanan minimal itu dibutuhkan peningkatan pelayanan jaringan air bersih baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan untuk melayani penduduk sebanyak 2.355 jiwa di Kecamatan Kiaracondong.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kondisi eksisting prasarana yang ada di Kecamatan Kiaracondong rata-rata memiliki

kondisi yang baik, namun ada beberapa jenis prasarana yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, seperti jaringan jalan, karena ada jalan dengan kondisi yang memiliki lebar yang kurang dan tidak mampu menampung pergerakan masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan.

2. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa ada 2 jenis prasarana yang telah memenuhi standar pelayanan minimal yaitu jaringan drainase dan persampahan, dan ada 3 jenis prasarana yang belum memenuhi standar pelayanan minimal yaitu jaringan jalan dari segi mobilitas, jaringan air limbah, dan jaringan air bersih.

E. Rekomendasi

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini, maka didapatkan rekomendasi sebagai berikut :

1. Jaringan Jalan
Meskipun tingkat pelayanan jaringan jalan di Kecamatan Kiaracandong dalam segi aksesibilitas telah memenuhi standar pelayanan minimal, namun dari segi mobilitas belum memenuhi standar pelayanan minimal. Masih ada jalan dengan kondisi yang kurang baik seperti lebar jalan yang kurang (sempit) dan banyaknya jumlah kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yang melewati 1 (satu) jalan dalam waktu yang bersamaan, sehingga menyebabkan kemacetan dan mengakibatkan mobilitas atau pergerakan penduduk menjadi terganggu. Maka dari itu perlu adanya perbaikan jalan berupa pelebaran dan perbaikan jalan yang memiliki kondisi yang rusak dan kurang baik, khususnya jalan lokal yang menghubungkan antar permukiman warga, agar mobilitas penduduk bisa berjalan dengan baik.
2. Air Limbah
Dari hasil analisis dan kesimpulan yang dilakukan, ada sekitar 7.885 jiwa dengan persentase 6,06 % yang harus terlayani tangki septik untuk mencapai dan memenuhi standar pelayanan minimal, maka dari itu perlu adanya penambahan jumlah tangki septik sebanyak 316 unit secara komunal di Kelurahan Sukapura, karena ada sebanyak 15.051 jiwa yang belum mendapatkan pelayanan tangki septik dari total jumlah penduduk 28.096 jiwa., dan berdasarkan data dari draft SPM Kota Bandung, masyarakat di Kelurahan Sukapura didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan jumlah 3.794 KK MBR atau 18.970 jiwa MBR.
3. Jaringan Drainase
Meskipun tingkat pelayanan jaringan drainase di Kecamatan Kiaracandong telah memenuhi standar pelayanan minimal, namun ada kawasan atau area yang masih terdapat genangan dengan luas 0,4 Ha yang terletak di simpang Jl. Jakarta – Jl. Kiaracandong Kelurahan Babakan Surabaya dengan

durasi \pm 3 jam. Maka dari itu perlu adanya perbaikan saluran drainase, karena salah satu penyebab terjadinya genangan adalah penyumbatan yang terjadi di saluran drainase sehingga air meluap dan mengakibatkan genangan.

4. Persampahan
Dari hasil analisis dan kesimpulan yang ada, pengelolaan persampahan di Kecamatan Kiaracondong sudah berjalan dengan baik, namun masih ada penduduk yang belum mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah yaitu sekitar 11.484 jiwa, maka dari itu perlu peningkatan lagi dalam hal pengangkutan sampah agar tingkat pelayanan persampahan di Kecamatan Kiaracondong bisa berjalan dengan baik.
5. Air Bersih
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan mengacu pada Permen PU No. 01 Tahun 2014, ada sekitar 6.871 jiwa yang harus terlayani sistem jaringan air bersih dan jika mengacu pada Draft SPM Kota Bandung ada sekitar 2.355 jiwa yang harus terlayani sistem jaringan air bersih, maka dari itu perlu adanya peningkatan pelayanan air bersih yang di prioritaskan di Kelurahan Sukapura dengan melakukan penambahan sistem perpipaan yaitu Kran umum, karena ada sekitar 12.446 jiwa yang belum mendapatkan pelayanan jaringan air bersih dari total jumlah penduduk 28.096 jiwa, dan berdasarkan data dari draft SPM Kota Bandung, masyarakat di Kelurahan Sukapura didominasi

oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan jumlah 3.794 KK MBR atau 18.970 jiwa MBR.

Daftar Pustaka

- Ajeng Dwi Handayani dan Nany Yuliasuti. 2013. *Identifikasi Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Lingkungan di Urban Fringe Area Kelurahan Pudakpayung*. Jurnal Teknik PWK Vol. 2, No.3. Semarang: UNDIP
- Aswar. 1986. *Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pengelolaa Sampah*. <http://www.academia.com>. Di akses pada tanggal 15 Mei 2019
- Badan Pusat Statistik.2018. Kecamatan Kiaracondong Dalam Angka. Bandung. Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
- Badan Standarisasi Nasional. 2004. *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan*. Bandung: Badan Standarisasi Nasional.
- Dharoko. 1993. *Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pada Lingkungan Permukiman di Wilayah Kota Palu*. <http://www.academia.edu>. Di akses pada tanggal 15 Mei 2019
- Fakhli. 2017. *Definisi Septic Tank dan Proses Pembuatannya Agar Tidak Mencemari Air dan Tanah Sekitar*. <http://www.kumpulengineer.com> Di akses pada tanggal 15 Mei 2019
- Hesmar.2002. *Drainase Perkotaan*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Miro. Fidel. 2005. *Analisis Pemilihan Moda Transportasi Umum Rute Padang-Jakarta*. <http://www.journals.itb.ac.id>. Di

- akses pada tanggal 15 Mei 2019
- Miro. 2005. *Pengaruh Sistem Tata Guna Lahan Terhadap Aksesibilitas dan Mobilitas*. <http://eprints.undip.ac.id>. Di akses pada tanggal 15 Mei 2019
- Mudianto. Arif. 2014. *Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sarana dan Prasarana Kabupaten Kutai Timur*. Tugas Akhir Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Nitikesari. 2005. *Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah*. <http://www.kumpulengineer.com>. Di akses pada tanggal 15 Mei 2019
- Peraturan Daerah Kota Bandung No.18 Tahun 2001 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031*.
- Pratama. Cahya Furqon. 2013. *Analisis Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pada Permukiman Komunitas Pemulung Di Kota Kediri*. Tugas Akhir Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Puspita Dina dan Djoko Suwandono. 2014. *Evaluasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Permukiman Di kelurahan Bandarjo Kabupaten Semarang*. Jurnal Teknik PWK Vol. 3, No.4. Semarang: UNDIP
- Republik Indonesia. 2001. *Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman*. Jakarta.
- Setiana. 2018. *Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan di Wilayah Kota Bandar Lampung*. Tugas Akhir Fakultas Teknik. Lampung. Universitas Lampung.
- Sinulingga. Budi D. 1999. *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*. <http://www.eprints.umm.ac.id>. Di akses pada tanggal 15 Mei 2019
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suripin. 2004. *Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit Universitas Indonesia
- Tamin. 2000. *Pengaruh Sistem Tata Guna Lahan Terhadap Bangkitan dan Tarikan Pergerakan Manusia*. <http://www.elib.unikom.ac.id>. Di akses pada tanggal 15 Mei 2019
- Undang-undang Republik Indonesia No.4/1992 Tentang Perumahan dan Permukiman*
- Wahyu. 2008. *Pendekatan dan Teknologi Pengelolaan dan Pengolahan Sampah*. <http://www.eprints.umm.ac.id>. Di akses pada tanggal 15 Mei 2019